

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara yang berkembang terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan Nasional. Pembangunan bertujuan agar bisa menuju suatu kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa adanya pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal yang masih menjadi titik berat dalam suatu pembangunan itu terletak pada bidang ekonomi sebagai penggerak utama dalam pembangunan. Selain itu, yang menjadi penting adalah Sumber daya manusia yang memadai (Jepri, 2019).

Herliarta mengatakan dalam buku Pembangunan Nasional bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam hal mensejahterakan rakyatnya karena, pemerintah mempunyai fungsi dalam hal memberikan pelayanan (service) kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan tercapai (Maulidiah & Megawati, 2022). Kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan sehingga transparansi akan ada. Pembangunan utamanya bertujuan untuk membangun suatu kemandirian , terutama pembangunan di daerah perdesaan.

Pemerintah memiliki satu misi yaitu bagaimana caranya membangun daerah perKalurahan yang dapat dicapai melalui adanya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Kalurahan dan memperkuat institusi serta mendukung rantai produksi dan pemasaran. Tujuan adalah untuk memberikan peluang yang sama di setiap daerah

perdesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan Nasional (Pratiwi & Novianty, 2020).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menjelaskan Indonesia dalam hal ini akan berfokus kepada dua hal pendekatan utama, yakni dalam sektor ekonomi berupa pengelolaan sumber daya ekonomi dan juga peningkatan terhadap nilai tambah ekonomi. Untuk mencapai hal ini perlu dilakukan lintas sektor dan lintas wilayah, semua sektor harus bersinergi untuk membentuk keterpaduan, seperti halnya dalam sektor pariwisata, sektor industri pengolahan, serta sektor ekonomi digital. Namun hal tersebut belum bisa terlaksana karena adanya virus COVID-19 yang memasuki Indonesia pada tahun 2019 tentu saja hal ini yang membuat terhambat. Semua kegiatan terpaksa berhenti dan harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Sehingga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 terhambat dan Indonesia memperkirakan adanya resiko “Ketidakpastian” akan terus mempengaruhi Indonesia bahkan dunia. Pada tahun 2020 dimana pandemi covid yang berpengaruh hampir di seluruh aspek masyarakat sehingga IMF pada bulan Juni 2020 merubah arah pertumbuhan ekonomi menjadi minus 4,9 (Pambudi et al., 2020).

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menempatkan perdesaan sebagai pusat pembangunan agar dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan ruang dan berhak menata serta menjalankan misi pemerintahan, kepentingan masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah Desa memiliki hal untuk mengelola dan

menjaga wilayah nya secara mandiri , sehingga hadirnya UU di jadikan pemerintah Desa untuk membuat suatu badan usaha agar dapat meningkatkan roda perkonomian. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang penyalurannya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran tersebut kemudian di alokasi kan untuk pembangunan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemiskinan masih saja terjadi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan memajukan Desa maka ada kebijakan dana Desa yang membangun partisipatif daerah Desa. Kementrian Desa mendorong kewirausahaan yang ada di Desa sehingga ini merupakan salah satu strategi Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sebuah Desa yang mandiri Pemerintah Indonesia Membuat kebijakan untuk Desa yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di dalam pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa “Desa bisa membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang langsung di kelola oleh masyarakat yang ada di Desa, dengan ada nya BUMDes ini di harapkan roda perekonomian masyarakat akan semakin kuat sehingga masyarakat bisa sejahtera. Potensi alam yang ada di setiap Desa dapat di manfaatkan dengan baik, keunggulan yang di tonjolkan pada Desa manfaatkan dengan baik. Tentu saja hal mengenai BUMDes ini di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha Desa berbentuk badan usaha dengan sumber modalnya berasal dari alokasi dana Desa yang dibedakan sebagai pengelolaan asset, pelayanan jasa, dan usaha lainnya demi kesejahteraan dan kontribusi masyarakat itu sendiri serta untuk memperkuat perekonomian Desa” (Yudiarno et al., 2021).

Pendirian BUMDes ini harus melihat potensi atau keunggulan apa yang ada di Desa tersebut, yang nantinya akan di kembangkan lagi sebuah unit usaha. Bahkan di beberapa wilayah Desa lainnya BUMDes ini telah beroperasi dan dapat memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan Desa (Prambudi, 2021). BUMDes sangat diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi di Desa sehingga mampu Menambah pendapatan asli Desa, jika Pendapatan asli Desa itu berjalan dengan baik dan meningkat serta mampu mengurangi pengangguran maka ke depan nya Desa akan menjadi semakin Mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan adanya BUMDes dapat menumbuh kan semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan objek wisata yang ada di Desa nya. Suatu Desa dapat di katakan berhasil dalam hal pembangunan pariwisata nya yaitu di lihat dari sarana prasarana serta kondusif lingkungan nya sehingga masyarakat akan tertarik.

Integrated Village Development merupakan salah satu konsep yang di gunakan untuk mengoptimalkan berbagai macam keunggulan Desa yang ada, sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat. Langkah yang bisa di lakukan adalah dengan mencari potensi apa yang di miliki suatu Desa, lalu nanti akan di kembangkan lagi menjadi sebuah unit usaha yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga Strategi Pembangunan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan melakukan pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa kita kenal dengan istilah BUMDes (Febriana & Meirinawati, 2021).

Peran pemerintah Desa sangat penting untuk mengoptimalkan BUMDes yang ada. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah penghasilan asli Desa. Pengotipmalan potensi yang ada di Desa juga merupakan hal yang harus di lakukan, sehingga BUMDes

akan mampu berjalan dengan baik. Pemerintah juga memiliki tugas untuk mensosialisasi pentingnya BUMDes kepada masyarakat sehingga pola pikir masyarakat akan berubah dan akan mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Memfasilitasi agar BUMDes dapat berjalan dengan baik, baik itu dalam hal pendidikan dan pelatihan juga membantu dalam meningkatkan BUMDes. Dan fungsi pemerintah Desa yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja pengurus BUMDes. Dengan adanya monitoring akan dapat melihat sejauh mana perkembangan BUMDes yang ada. Selain peran pemerintah, partisipatif masyarakat juga sangat penting. Masyarakat yang aktif akan sangat membantu dalam berjalan nya BUMDes sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendpaatan asli Desa.

Pada tahun 2018 Jumlah BUMDes yang ada di sleman masih sangat minim, berdasarkan data Pemkab terdapat 86 Desa yang ada di sleman dan baru 25 Desa atau sekitar 29% Desa yang sudah memiliki BUMDes. Padahal BUMDes ini sangat penting sekali untuk memaksimalkan potensi atau keunggulan yang ada di Desa. Sehingga Pemkab Sleman masih terus mengupayakan agar BUMDes itu bisa ada di semua Desa di sleman. Di kutip dari [www.sembada.id](http://www.sembada.id) bahwa BUMDes ini sebenarnya membutuhkan modal akan tetapi hal tersebut bisa di manfaatkan dengan mengelola dana Desa , hanya saja untuk pengelolaan anggaran harus di lakukan adanya transparansi dana dan yang paling penting adalah pola pikir masyarakat Desa harus di ubah (sembada.id, n.d.).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah merealisasikan nomenklatur kecamatan dan Kalurahan di wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kalemagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Adanya

perubahan Nomenklatur ini sangat berkaitan dengan keistimewaan DIY, adanya perubahan ini di sebabkan ingin mengembalikan nomenklatur asli DIY. Sehingga berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa “Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon”. Sehingga sejalan tahun 2020 , Nama-nama kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan di kembalikan seperti pada zaman Kerajaan. Dalam penamaan ini pula akan menyerupai struktur organisasi pada Kerajaan Nagari Kasultanan Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Dalam Peraturan Gubernur Pasal 2 menyatakan bahwa “Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk memberikan pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY”. Adanya peraturan ini menjadikan semua nama desadi daerah istimewa yogyakarta menjadi “Kalurahan” dan Kecamatan menjadi “Kapanewon” Sehingga Kalurahan Girikerto juga berubah menjadi kalurahan Girikerto, dan BUMDes “Gerbang Merapi” juga berganti menjadi BUMKal “Gerbang Merapi”.

Kalurahan Girikerto adalah salah satu Kalurahan yang berada di dekat lereng merapi. Meskipun daerah tersebut rawan akan ancaman bencana letusan merapi tetapi banyak hal yang di dapatkan oleh masyarakat. Seperti hal nya yang terjadi pada tahun 2021 dalam ( [www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com) ) (Suproho, 2021) terjadi aktivitas luncuran material gunung merapi menuju ke arah barat daya dan membuat Kalurahan Girikerto yang ada di Kapanewon Turi harus mempersiapkan skema

evakuasi. Kalurahan Girikerto di Kapanewon Turi, terletak lebih dari 13 Km dari puncak merapi.

Kalurahan Girikerto terdiri dari 5 Dusun, dimana 4 diantaranya merupakan Daerah Rawan Bencana II dan satu Dusun Daerah Rawan Bencana III. BUMDes Gerbang merapi merupakan salah satu BUMDes yang ada di Sleman. Sejak tahun 2020 BUMDes kemudian mengganti namanya dengan nama BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan). BUMKal ini merupakan BUMKal yang terletak di Kalurahan Girikerto dan, sudah berdiri sejak tahun 2014. Kalurahan Girikerto juga memiliki berbagai macam sumber daya alam , karena tanah nya yang subur. Daerah ini merupakan daerah yang dekat dengan gunung merapi. BUMKal Gerbang merapi memiliki beberapa unit usaha di antara nya yaitu : Unit Pembayaran Listrik, Ekowisata Pancoh. Ekowisata Pancoh ini terletak di Dusun Pancoh, banyak sekali hal yang terdapat dalam Ekowisata Pancoh ini, seperti pemandangan alam yang indah, waduk, dan ada ekowisata berbasis edukasi seperti pembuatan kerajinan tangan (Vembri Aulia Rahmi, Ismanto & Fathoni, 2020).

Badan Usaha Milik Kalurahan yang sudah sangat berjalan sejak tahun 2014 ini tetap perlu perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kalurahan sehingga BUMKal akan tetap berjalan dan berkembang. Kendala yang di oleh BUMKal bisa saja dalam hal pembedayaan masyarakat , modal , maupun adanya pandemi covid juga menjadi alasan BUMKal itu masih memiliki kendala. Peran pemerintah disini sangat penting untuk tetap mempertahankan BUMKal supaya bisa berjalan dan lebih berkembang lagi maka, dengana adanya fenomena ini maka peneliti memutuskan untuk lebih meneliti bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan BUMKal Kalurahan Girikerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas , maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan BUMKAl Kalurahan Girikerto?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengembangan BUMKAl Kalurahan Girikerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas , maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Peran Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan BUMKAl Kalurahan Girikerto.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengembangan BUMKAl Kalurahan Girikerto.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas , maka hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat

### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di bidang Tata Kelola Pemerintah Desa khususnya Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl).

### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sehingga bisa meningkatkan daerah-daerah yang ada di Sleman terkhususnya Daerah Turi. Selain itu juga bisa menjadi bahan referesnsi pemerinah Kalurahan dan di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memaksimalkan BUMKAl nya.



## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada sebanyak 15 jurnal. Jurnal-jurnal yang di ambil ini di dapat dari Google Scholar, Publish&Perish , Scopus. Dari adanya jurnal-jurnal ini akan di jadikan bahan referesni untuk karya tulis ilmiah ini.

Adapun peneliti melakukan tinjauan pustaka atau *literatur review* yang bersumber dari penelitian–penelitian sebelumnya dimana penelitian tersebut berkaitan langsung dengan penelitian ini, antara lain:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Fifianti (Meigawati, 2018)	Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumdes) Di Kalurahan Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa ada 3 yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai peran penting dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes yang baik, sehingga BUMDes nantinya akan mampu berhasil dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga yang akan berfokus kepada kepentingan yang ada dalam masyarakat. Untuk program pemberdayaan yang di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membentuk program yang di diskusikan bersama para anggota nya.
2.	Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo(Ubi Laru & Suprojo, 2019)	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (Bumdes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes dalam unit pengelolaan keuangan adalah sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan kepada masyarakat dan mendukung setiap kegiatan yang akan di lakukan oleh masyarakat. Pemerintah Desa juga

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Vol. 8 No. 4 (2019)	memberikan sarana prasarana yang di jadikan sebagai penunjang. Kekurangan yang terjadi dalam unit ini adalah kurang nya sosialisai kepada masyarakat terkait adanya keberadaan bumdes. Masyarakat juga jika sudah melakukan transaksi piutang akan merasa sulit untuk di kembalikan karena kurang nya faktor kesadaran yang ada selain itu , pengurus BUMDes juga belum mampu dalam hal manajemen keuangan dan pembuatan laporan.
3.	Hendra Kusumaa, Happy Febrina Hariyanib. (Hendra Kusumaa, 2021)	KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PROGRAM BUMDES  JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 3(2019)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada program BUMDes sudah melakukan sesuai dengan program pemberdayaan. Pemerintah desa memberikan pelatihan-pelatihan yang berupa pengembangan Sumber daya manusia, dalam hal ini melakukan pemberdayaan secara kelompok maupun secara individu.  Namun di kecamatan batu ini untuk pelatihan yang bersifat kelompok masih pada tahap masa transisi, karena ada beberapa kendala yang terjadi seperti kekurangan stag yang mengakibatkan unit usaha nya menjadi tidak terawat.
4.	Sunarzi, Rizki Amanah, Ashifa, Sifa Silviana, Rangga Nanda, Adella, Widya, Yunita, Try Suci, Asty Novanandya. (Sunarzi, Rizki Amanah, Ashifa, Sifa Silviana, Rangga Nanda, Adella, Widya,	Penguatan Kapasitas BUMDes Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Alas Kaki Di Desa Sukamakmur.	Perlu dilakukan untuk dapat memberikan akselerasi yang optimal pada pencapaian akhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Secara umum keterpaduan rencana, pelaksanaan dan evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh dalam beberapa Desa seperti di wilayah Kecamatan Ampelagading. Kondisi BUMDe sbelum tertata dengan baik, namun pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu kendala juga yang

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
	Yunita, Try Suci, 2022)		terdapat di dalam BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia yang rendah dan jaringan usaha yang lemah sehingga tidak mampu untuk menembus pasar seperti halnya salah satu UMKM yang berada di kecamatan Ciomas yang di mana UMKM tersebut sudah ada sejak lama namun saat ini belum mampu untuk menguasai kemampuan teknologi informasi sehingga hal ini menyebabkan mereka itu masih kalah saing karena kendalanya tersebut dalam hal teknologi dan sumber daya manusia.
5.	Sumiasih (Sumiasih, 2018)	Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)  Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Law Journal) Vol. & No.4 Desember  E-ISSN: 2502-3101 P- ISSN:2302-528x	Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes di Indonesia sepenuhnya mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa yang sudah mempunyai BUMDe. Daerah bali BUMDes sudah dapat di terima di kalangan masyarakat karena mereka merasa dengan adanya BUMDes akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Namun kendala yang masih di rasakan saat ini adalah kurangnya kemampuan untuk menganalisis potensi yang ada di desa dan juga perangkat desa yang belum terlalu mengerti mengenai BUMDes, masyarakat juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha.
6.	Ajisman Efendi(Efendi, 2019)	KEMANDIRIAN BUMDes MENYONGSONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID- 19 (Studi Kasus BUMDes Citra Lestari di Desa Adisana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menciptakan prgram-prgram bersama BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program-program yang ada itu seperti kerajinan menjahit dan bedah rumah. Program yang ada ini sangat membantu masyarakat sekali dalam meningkatkan perekonomian. Memberikan peluang yang sama ke

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		<p>Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.</p> <p>(Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JURTISI) Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 47-54 e-ISSN: 2807-1492)</p>	<p>setiap masyarakat yang ingin belajar menjahit. Namun kendala yang masih di rasakan sampai saat ini adalah belum memiliki bangunan fisik seperti kantor BUMDes, hal ini di sebabkan karena kurangnya biaya dan belum bekerja sama dengan orang ketiga sehingga untuk dana masih sangat kekurangan.</p>
7.	Agustina (Agustina, 2022)	Peran bumdes dalam membangun hubungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa pasir, Kec. Mijen Kabupaten Demak	<p>BUMDes Pada proses perjalananya ada berbagai masalah yang di hadapi masalah-masalah yang seringkali di hadapi oleh BUMDes contohnya pada Desa pasir ini adalah kurangnya partisipatif yang aktif dari pemerintah Desa dan pengurus BUMDes yang tidak bekerja secara maksimal sehingga menyebabkan BUMDes tersebut sering kali mengalami perubahan anggota. Pemerintah Desa harus mampu membangun hubungan antar masyarakat yang baik sehingga akan terjalin semangat gotong royong , namun pada nyatanya adanya hubungan yang tidak cukup baik antara sesama masyarakat atau masyarakat kepada orang lain yang menyebabkan bumdes masih terkendala karena merasa tidak terbantu di lingkungan Desanya sendiri.</p>
8.	(NURROHMANN, 2020)	<p>PERAN BUMDes TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PRESPEKTIF ISLAM (Studi di BUMDes Nglanggeran, Pathuk, Gunung kidul )</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Nglanggeran adalah sebuah desa dengan memiliki banyak sekali potensi alam di dalamnya , sehingga berdasarkan UU Nomoer 6 Tahun 2014 membentuk BUMDes yang di harapkan dengan adanya hal tersebut akan bisa memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pemberdayaan. Adanya peran BUMDes yang berperan di dalamnya sehingga masyarakat akan merasa terbantu. BUMDes mengadakan pelatihan-pelatihan</p>

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			yang tentunya akan membantu masyarakat dalam hal melakukan pemberdayaan. Harus adanya kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BUMDes sehingga akan memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut seperti halnya mengadakan latihan-latihan yang rutin.
9.	Ahmad Yani, (YANI, 2020)	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG LANJUT KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya Peran Pemerintah Desa sehingga akan meningkatkan Pendapatan asli Desa melalui adanya BUMDes. Peran yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dengan mengeluarkan Perdes No. 1 Tahun 2016 dan dinamakan dengan BUMDes Jaya Mandiri. Namun masih ada kendala yang terjadi dalam Peran Pemerintah ini, yaitu kurangnya modal yang diberikan untuk meningkatkan BUMDes dan masyarakat masih susah dalam hal partisipasi.
10	Putri Nugrahaningsih, Hermansyah Muttaqin.  (Nugrahaningsih & Muttaqin, 2018)	Optimalisasi Peran BUMDes Kalurahan Bulusur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Kalurahan Wisata  Prosiding PKM-CSR	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) Wahana Arta Nugraha Kalurahan Bulusur (Kecamatan Wonogiri), di Kabupaten Wonogiri termasuk dalam kategori baik dan dijadikan percontohan (suaramerdekadotcom, 2015). BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.
11	Nurul Maulidiah, Suci Megawati,  (Maulidiah & Megawati, 2022)	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) dalam Pengembangan Kalurahan Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Kalurahan Sambibulu,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BUMDes Sambimadu dalam pengembangan Kalurahan Wisata belum sepenuhnya berhasil karena belum adanya pelatihan dan bimbingan khusus yang diberikan kepada Pegawai BUMDes Sambimadu sehingga belum berkompeten dan memadai dalam

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
		Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)  Publika, vol 10 391-406	melaksanakan tugasnya. Namun sebaliknya, pada Sumber Daya Financial nya dapat dikatakan berhasil dengan adanya Modal yang berasal dari berbagai sumber salah satunya Dana Kalurahan dari APBDes Kalurahan Sambibulu.
12	Taufik R.Talalu, Citra Fransisca indah lestari dono putri, Ibnuh Vanli Mokodompit.  (Taufik R.Talalu, Citra Fransisca indah lestari dono putri, 2021)	Metode Utama Komunikasi Pemasaran Atraksi Wisata Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa , Unit usaha “Kolam Renang Nagara” yang dikelola BUMDes “Go Inovasi” dibangun pada tahun 2019 dan mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 2020 di tengah wabah Covid-19. Pembangunan atraksi wisata di Kalurahan Nagara diharapkan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Promosi dibutuhkan agar “Kolam Renang Nagara” dapat dikenal luas dan dikunjungi wisatawan, sehingga kebangkitan ekonomi masyarakat bisa terwujud.
13	Aris Arif Mundayat, Yuhastina, Bagas Narendra, Gufronudin.  (Aris Arif Mundayat, Yuhastina, Bagas Narendra, 2022)	STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI KALURAHAN MELALUI SISTEM EKONOMI  (Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2022, 11 (1): 142 -166  GOTONG ROYONG BERBASIS BADAN USAHA MILIK DESA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes juga mengalami kendala dalam pengimplementasiannya di Desa karena tenaga kerjanya produktif itu sudah sangat langka sekali karena mereka banyak yang memilih bekerja untuk di industri perkotaan akibatnya BUMDes terpaksa harus jalankan oleh warga-warga yang senior yang masih kurang mampu dalam memiliki pengalaman bisnis maupun strategi pemasaran di pasar pengurus tidak memiliki pengalaman di bidang bisnis maupun bagaimana strategi pasar.  namun lebih mengedepankan kepada apakah masyarakat senior ini memiliki waktu yang luang atau tidak tentunya hal ini sangat berdampak tidak baik karena BUMDes tidak dikelola oleh orang yang semestinya sudah

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			berpengalaman di dalam bisnis, dikhawatirkannya dengan adanya hal ini maka BUMDestidak dapat beroperasi dengan baik
14	Alter Maykel Ruru, Florence Daicy, Lengkong Joorie Marhaen Ruru.  (RURU & RURU, 2020)	Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa, dimana ada beberapa unit usaha di dalam nya yaitu, jasa sewa tenda dan pasar desa. Mesikpun sudah memiliki unit usaha ini belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa secara maksimal. Namun ada usaha baru yang di buat oleh pemerintah desa dan juga bumdes untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu membuat home industry. Namun masih adanya kendala yang terjadi yaitu pemerintah desa harus menggali potensi apa yang ada di desa sehingga ketika sudah di ketahui maka akan bisa di jadikan sebagai unit usaha, karena itu merupakan potensi dari desa nya. selanjutnya kendala nya adalah belum sepenuhnya mengetahui potensi yang di miliki oleh masyarakat desa karena pemerintah belum melakukan mediasi.
15	(Kunja et al., 2019)  Emmanuel Runjuk Kunja, Agustinus Longa Tiza, Fidelis Atanus	PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA FAFINESU C KECAMATAN INSANA FAFINESU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANE) Vol 1, No 1, April 2019  e-ISSN : 2528-097X	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, dalam pendirian BUMDes ini terdapat beberapa kendala pertama, Pengelola BUMDes belum melakukan sosialisasi secara rutin terutama mengsosialisasi program-program yang di jalankan oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Kendala yang masih di rasakan juga adalah Pemerintah Desa belum melakukan fasilitasi terhadap pengelola

No.	Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
			<p>BUMDes sehingga masih kesulitan dalam menjalankan program nya.</p> <p>Pemerintah Desa belum melakukan monitoring dan evaluasi sehingga ketika adanya masalah yang terjadi bisa di selesaikan secepatnya.</p>

Dari 15 jurnal yang di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes itu sudah ada, meskipun masih belum maksimal. BUMDes sangat penting ada di dalam desa, adanya BUMDes akan memacu semangat masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Salah satu hasil penelitian yang di lakukan oleh (Ubi Laru & Suprojo, 2019) menjelaskan bahwa peran pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes itu penting , Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes dalam unit pengelolaan keuangan adalah sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan kepada masyarakat dan mendukung setiap kegiatan yang akan di lakukan oleh masyarakat. Pemerintah Desa juga memberikan sarana prasarana yang di jadikan sebagai penunjang. Kekurangan yang terjadi dalam unit ini adalah kurang nya sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya keberadaan BUMDes.

Lalu selanjutnya ada hasil penelitian yang di lakukan oleh (Kunja et al., 2019) bahwa BUMDes itu masih terdapat kendala, kurangnya kolaborasi antara pemerintah desa dan BUMDes yang menyebabkan masih terjadinya kendala dalam pengembangan BUMDes. Selain itu dari pihak pengelola juga belum mensosilisasikn program-program apa yang ingin di bawa oleh BUMDes, sehingga dengan adanya hal tersebut maka masyarakat akan kurang dalam hal



partisipasinya. pemberian fasilitas oleh pemerintah desa juga menjadi faktor bahwa BUMDes masih sulit berkembang, karena fasilitas merupakan salah satu dari peran pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Pemerintah Desa belum melakukan monitoring dan evaluasi sehingga ketika adanya masalah yang terjadi bisa di selesaikan secepatnya.

Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh (RURU & RURU, 2020), pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BUMDes sudah ada di desa tersebut, ada unit usahanya juga yaitu menjahit. Dan masyarakat dengan adanya unit usaha tersebut membuat masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. Namun kendala yang masih dirasakan adalah peran dari pemerintah desa dalam menggali potensi baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pemerintah desa belum mengetahui masyarakat itu memiliki potensi terhadap apa.

Berdasarkan hal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa itu sudah ada yang beberapa mulai mengemangkan BUMDes meskipun belum berjalan secara maksimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus kepada peran pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Peran Badan Usaha Milik Kalurahan di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. BUMKal tersebut sudah berjalan sejak tahun 2014 dengan unit usahanya yaitu alam.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Peran Pemerintah Kalurahan**

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Sehingga peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan. Menurut Laurence Ross, peran merupakan dinamisasi dari penggunaan

status ataupun penggunaan hak dan kewajiban yang biasa di sebut dengan status subjektif. Peran berasal dari kata peran, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Peran (role) di definisikan sebagai harapan sosial dan harapan sosial tersebut merupakan bagian dari self. Teori peran (role theory) Teori peran menjelaskan bahwasanya peran yang dimiliki oleh seseorang itu tidak hanya berupa perilaku tetapi juga dilihat dari kepercayaan dan attitutnya hal ini mempunyai makna bahwa seorang individu akan membawa sikap mereka ke dalam lingkungan masyarakat dan hal itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Sebuah perubahan dalam peran akan mengakibatkan perubahan sikap. Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya.

Pemerintah secara etimologi berasal dari kata dasar yaitu “perintah” mempunyai makna untuk menyuruh melakukan sesuatu, baik itu perintah, aba-aba, atau komando. Dalam bahasa Inggris pemerintah di sebut Government artinya mengendalikan. Menurut Van Poelje Jum Anggaraini pemerintah dalam arti luas segala sesuatu yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan yang di lakukan untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan dalam arti sempit pemerintah merupakan alat/badan perleknngkapan Negara yang di serahi Pemerintahan ataupun tugas-tugas Pemerintah. Pemerintah merupakan sistem

untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur tatanan kehidupan suatu Negara.

Pemerintah juga di artikan sebagai suatu kelompok orang yang bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas dalam menggunakan kekuasaan. Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah nya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan , dan pemberdayaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah bahwa ,“Pemerintah Daerah merupakan kepala negara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Pasal 202 menyatakan bahwa “Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa,. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa, kepala Dusun, Rukun tetangga, dan Rukun warga”. Sehingga dalam hal ini dapat di katakan bahwa seluruh aparat Desa itu terlibat dalam urusan pemerintah Desa. Pemerintah memiliki fungsi yang sangat berkaitan dengan pemberdayaan yaitu upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Desa sehingga akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Hal ini di lakukan demi terciptanya suatu kemakmuran.

Peran pemerintah harus optimal untuk membangun masyarakat sehingga menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo(2010) (Meigawati, 2018) menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah sehingga dapat menyeimbangkan pembangunan, hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah dapat memberikan acuan . Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah Mendorong semangat masyarakat sehingga akan terciptanya semangat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan. Pemerintah di sini berperan untuk memberikan bimbingan dan arahan secara berkala kepada masyarakat agar terciptanya partisipasi yang aktif biasanya dalam hal ini untuk menumbuhkan semangat partisipasi aktif masyarakat bisa dengan Tim penyuluh ataupun badan-badan yang memberikan pelatihan

3. Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah Pemerintah berperan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman sehingga pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah Kalurahan sebagai fasilitator di sini peran pemerintah yaitu sebagai pendamping melalui kegiatan pelatihan bisa juga

dengan pendidikan peningkatan keterampilan atau pendanaan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Selanjutnya ada teori yang di kemukan oleh Arif (Dalam Nurdin,2014) (Nubu & Ihsan Mattalitti, 2022) menjelaskan bahwa Teori Peran Pemerintah ada 4 Indikator yaitu, Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui adanya penerbitan peraturan-peraturan. Peraturan itu di maksudkan akan menjadi arah dan acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerdayaan dan mengembangkan BUMKAl.

b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah upaya pemerintah agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan. Pemerintah bisa melakukan nya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah akan memfasilitasi semua agar terciptanya suasana yang aman dan nyaman. Dalam fasilitator akan tersedianya sarana dan prasarana dan pendanaan/modal.

d. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai Katalisator yaitu Pemerintah akan menempatkan dirinya sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang ada di dalam daerah.

Pemerintah Desa harus mampu mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada di desa nya , pengelolaan dana desa demi terlaksana nya pembangunan demi terciptanya kemakmuran. Pemerintah desa perlu adanya peran yang secara optimal dan mendalam untuk membangun desa agar menjadi desa yang mandiri. Menurut Arif (2012) dalam hal ini peran pemerintah desa terbagi menjadi empat indikator yaitu :

a. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam hal ini yaitu menyapaikan arah sehingga akan menyeimbangkan penyelenggaraan peraturan. Peran pemerintah ini bisa dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang akan membantu dalam proses pembangunan.

b. Peran pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu pemerintah berperan untuk menggerakkan partisipasi dari berbagai pihak yang terjadi dalam proses pembangunan. Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan arahan yang rutin kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bisa melakukan hal ini dengan kolaborasi bersama tim penyuluhan.

c. Peran pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, tertib serta memfasilitasi tersedianya sarana seperti permodalan.

d. Peran pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah berposisi sebagai agen untuk mempercepat pembangunan dengan melakukan pengembangan kepada potensi daerah dan negara sehingga akan menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. BUMKal

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Badan usaha milik Kalurahan adalah suatu badan usaha yang bersifat sosial yang dana nya berasal dari Kalurahan dan di kelola untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya BUMDes dan BUMKal itu sama, hanya saja di Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak di berlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon”. Sehingga untuk wilayah DIY kata Desa di ganti menjadi Kalurahan.

Berdasarkan peraturan BUMDes UU No. 6 tahun 2014. BUMDes memiliki karakteristik yaitu : 1. Berbentuk badan hukum. 2. Usaha gerak dalam bidang perekonomian. 3. Dana berasal dari pemerintah sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. 4. Salah satu sumber pendapatan Kalurahan. 5. Berupa layanan untuk masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDes) di Indonesia berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Kebijakan Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian,

Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan :

- a. Menaikkan perekonomian Desa.
- b. Memaksimalkan aset Kalurahan guna kesejahteraan Desa.
- c. Menaikkan usaha masyarakat dalam menata potensi ekonomi Desa.
- d. Menyediakan lapangan kerja.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melewati perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- f. Menaikkan penghasilan masyarakat Desa dan penghasilan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha memanfaatkan aset mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Lalu pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa”. Ayat 3 juga menyatakan bahwa “BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi,kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah”. Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Desa dan tentu saja harus di dukung oleh kebijakan daerah yang ada di kab/kota dalam hal memfasilitasi dan melindungi usaha yang akan di dirikan dalam Desa. BUMDes di harapkan dapat menggerakkan



roda perekonomian yang ada di masyarakat, aset yang ada di Desa harus sepenuhnya di jalankan oleh masyarakat Desa. Filosofi BUMDes ini harus dijiwai dengan semangat akan Self Help sebagai upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. BUMDes akan menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Desa dengan BUMDes sebagai institusi yang menaungi agar kegiatan tersebut dapat berjalan.

Unit usaha BUMKal di dasarkan pada potensi apa yang ada di Kalurahan berupa Sumber Daya Alam. Kemudian di kembangkan lagi menjadi sebuah usaha seperti pariwisata, kerajinan, perternakan agrobisnis, perikanan. Pada tahun 2018 Jumlah BUMKal yang ada di Sleman masih sangat minim, berdasarkan data Pemkab terdapat 86 Kalurahan yang ada di Sleman dan baru 25 Kalurahan atau sekitar 29% Kalurahan yang sudah memiliki BUMKal. Padahal BUMKal ini sangat penting sekali untuk memaksimalkan potensi atau keunggulan yang ada di Kalurahan. Sehingga Pemkab Sleman masih terus mengupayakan agar BUMKal itu bisa ada di semua Kalurahan di Sleman. Di kutip dari [www.sembada.id](http://www.sembada.id) bahwa BUMKal ini sebenarnya membutuhkan modal akan tetapi hal tersebut bisa di manfaatkan dengan mengelola dana Kalurahan , hanya saja untuk pengelolaan anggaran harus di lakukan adanya transparansi dana dan yang paling penting adalah pola pikir masyarakat Kalurahan harus di ubah (sembada.id, n.d.)

BUMKal merupakan suatu usaha yang di dirikan oleh pemerintah Kalurahan bersama masyarakat. Dengan hal ini dapat di simpulkan bahwa BUMKal memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dan menambah pendapatan asli Kalurahan. BUMKal tidak hanya untuk mendapat keuntungan secara finansial saja tetapi di harapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan dan menyelesaikan masalah yang ada di Kalurahan. Pembentukan BUMKal ini

merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa Kalurahan tersebut merupakan Kalurahan mandiri. Dalam (Alfrida Heanity Panjaitan, Ardi Eko Wijoyo, Fajri Maulana, 2022) menyatakan bahwa pembangunan Kalurahan masih mendapatkan kendala yaitu pada kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam dapat tahun 2019 terkait dana Kalurahan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dana Kalurahan yang berikan harus bisa di alokasi kan dengan baik untuk menciptakan pertumbuhan Kalurahan. Karena nya BUMKal memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Kalurahan Girikerto juga menjadi salah satu Kalurahan yang ada di Sleman yang mendirikan dan mengembangkan Sebuah Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan diberi nama BUMKal Gerbang Merapi. BUMKal Gerbang Merapi ini mulai berdiri di Tahun 2014 Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Kalurahan. Kalurahan Girikerto juga memiliki berbagai macam potensi alam yang ada di Lereng Merapi yang bisa diolah untuk menjadi Berbagai destinasi. BUMDes Gerbang Merapi ini memiliki beberapa unit usaha yaitu usaha pembayaran listrik masyarakat, ekowisata yang kemudian di sebut dengan Ekowisata Pancoh , Kampoeng wisata dalaman asri, dan Bumi Perkemahan lembah asri.

Berbagai unit usaha yang dikelola baik oleh warga masyarakat meliputi pemandangan alam yang indah dengan nuansa Kalurahan dan latar belakang Gunung Merapi, pembuatan kerajinan tangan seperti batik penanaman perawatan serta mematikan bunga ada juga embung atau waduk.

### 3. Analisis SWOT

Menurut Pearce dan Robinson Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang di gunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength) , Kelamahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi

dalam suatu pembangunan. Hal-hal yang di analisis adalah kekuatan dan kelemahan di kelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman di klasifikasikan menjadi faktor eksternal.

a. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan merupakan sumber daya yang di miliki oleh sebuah organisasi, dimana hal tersebut lebih unggul di banding pesaing nya dalam memenuhi kebutuhan daerah. Biasanya kekuatan muncul ketika sumber daya tersedia. Kekuatan yang tersedia bisa dari sumber daya alam , sumber daya manusia.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan suatu keterbatasan yang di miliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini kelemahan bisa berupa sumber daya alam maupun manusia yang akan menjadi hambatan dalam tercapainya sebuah tujuannya. Dalam implementasinya kelemahan bisa di lihat dari sarana dan prasarana yang tidak di miliki, bisa juga dalam keterampilan yang tidak memadai sehingga tidak akan mampu menarik masyarakat untuk ikut bergabung dalam suatu organisasi.

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan sebuah situasi yang akan saling menguntungkan dalam lingkungan sebuah organisasi. Sesuatu yang menjadi hal yang paling menonjol akan di jadikan sebagai salah satu peluang. Melihat peluang sangat penting sebab akan menjadi suatu hal yang akan di untungkan.

d. Ancaman (*threats*)

Ancaman merupakan sebuah situasi yang merupakan faktor utama tidak menguntungkan dalam suatu lingkungan. Ancaman merupakan suatu penghalang utama dalam mencapai sebuah tujuan atau posisi yang di inginkan. Hal-hal yang bisa menjadi ancaman itu bisa dari segi pesaing, perubahan teknologi , pembaharuan peraturan sehingga hal-hal ini akan menjadi salah satu faktor penghalang untuk keberhasilan perusahaan.

### **G. Definisi Konseptual**

Adapun Definisi Konsepsional dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah Kalurahan , pemerintah Kalurahan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pemberdayaan masyarakat. Sehingga perlu adanya peran optimal dari pemerintah. Dengan demikian peran pemerintah ada 3 yaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator.
- b. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Badan usaha milik Kalurahan adalah suatu Badan Usaha yang bersifat sosial yang dana nya berasal dari Kalurahan dan di kelola untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang di gunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength) , Kelamahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi dalam suatu pembangunan.

### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah pengertian yang lengkap tentang suatu variabel yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama variabel itu (komaruddin, 2016). Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut haru di operasionalisasi dengan Cara mengubahnya menjadi variable atau sesuatu yang

mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variable-variabel penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Parameter
- Peran pemerintah Kalurahan	- Peran Pemerintah sebagai Regulator	- Pemerintah Kalurahan membuat Peraturan Kalurahan mengenai BUMDes. - Pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat berupa kebijakan.
	- Pemerintah sebagai Dinamisator	- Pemerintah Kalurahan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMKal. - Pemerintah Kalurahan memberikan pelatihan kepada pengurus BUMKal.
	- Pemerintah sebagai Fasilitator	- Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan yang akan membantu dalam mengembangkan BUMKal. - Pemerintah memberikan bantuan bangunan fisik. - Pemerintah memberikan bantuan berupa non-fisik seperti modal.

### **I. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2005:51). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan penelitian ini karena pendekatan ini dapat mengungkapkan penelitian ini secara deskriptif dan juga metode kualitatif ini dapat mencari data secara detail.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Kualitatif Deskriptif. Metode ini dipilih oleh peneliti karena dengan penelitian Kualitatif peneliti bisa

menjelaskan bagaimana fenomena tersebut di ambil dan di teliti dengan sedalam-dalamnya begitupun dengan pengumpulan data nya untuk menjelaskan hasil yang sangat detail. Metode Penelitian yang akan diterapkan disertai tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, prosedur, indikator capaian yang terukur di setiap tahapan, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Sleman. Objek penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kalurahan Kalurahan Girikerto dan Direktur BUMKal Gerbang Merapi , Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

## 3. Unit Analisa

Unit analisis adalah komponen yang akan diteliti untuk memperoleh data. Penelitian yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN BUMKAL (BADAN USAHA MILIK KALURAHAN) “GERBANG MERAPI” KALURAHAN GIRIKERTO KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN“** sehingga unit analisa dari komponen ini adalah Kepala Lurah , Direktur BUMKal dan Ketua Unit-Unit Usaha.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Penelitian ini akan menggunakan jenis data primer. Data primer akan di hasilkan melalui wawancara bersama Kepala Lurah Girikerto dan Ketua Pengurus BUMKal Gerbang Merapi. Hal ini bertujuan untuk melihat Peran

Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam mengembangkan BUMKal yang ada di Kalurahan.

#### 1. Wawancara

Data akan di dapatkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terkait dalam objek penelitian ini, yaitu :

- a) Kepala Kalurahan
- b) Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan

#### b. Data Sekunder

Penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder akan di peroleh melalui berbagai referensi seperti jurnal, artikel, buku yang relevan mengenai inti pembahasan. Data sekunder ini akan di dapat melalui situs-situs atau web seperti Google Scholar, Publish & Perish, dll, yang sesuai dengan penelitian. Adapun Dokumen-dokumen yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah :

- a) Profil Kalurahan Girikerto
- b) Data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti Peraturan Kalurahan, Profil dan daftar kegiatan BUMKal, Anggaran dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kalurahan Girikerto.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan Tekhnik pengumpulan data sebagai berikut.

##### a. Observasi

Observasi, yaitu dilakukan dengan observasi kelapangan untuk melakukan pengamatan langsung kepada obyek penelitian guna untuk melengkapi hasil penelitian dan pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan kemudian menulis semua jawaban dari pemberi informasi (informan)

Tabel 1.3 Daftar Informan yang akan di wawancara

Informan	Jabatan
Pemerintah Kalurahan Girikerto	Lurah Girikerto
Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto.	Direktur BUMKal Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto
Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto.	Sekretaris BUMKal Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto
Ketua unit usaha BUMKal Gerbang Merapi Kalurahan Girikerto	Ketua Unit usaha

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Berbagai informasi yang dapat diperoleh melalui dokumentasi berupa surat-surat resmi, catatan, transkrip buku, proposal, laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian.



## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya analisis data maka akan mendapatkan data yang benar. Analisis dilakukan untuk menemukan pola. Menurut Sugiyono (2012:89) dalam (Iii & Penelitian, 2012) analisis data merupakan tahap pencarian dan penyusunan data secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data. Caranya dengan melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antara kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (YULISTIYONO, 2022).

### a. Reduksi data (Data Reduction)

Merupakan suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dalam memahami data-data yang sudah di kumpulkan sebelumnya.

### b. Penyajian data (Display Data),

Merupakan sekelompok informasi yang sudah tersusun sedemikian rupa baik dari kerapian, rinci, dan jelas sehingga dapat diambil kesimpulan dan tindakan. Hal yang biasanya muncul dalam data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.

### c. Penarikan kesimpulan (Verification),

Penelitian ini akan dijelaskan tentang makna dari data yang dikumpulkan. Hasil jawaban berdasarkan dari analisi data. Biasanya dalam hal ini panyajian kesimpulan akan berbentuk deskriptif objek yang di teliti.